POLITIK CERDAS BERINTEGRITAS

ANCAMAN POLITIK UANG

DALAM PILKADA 2020

GIRI SUPRAPDIONO
DIREKTUR DIKYANMAS KPK

GIRI SUPRAPDIONO

Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK

Giri telah bergabung dengan KPK lebih dari 1 dekade sejak tahun 2005. Saat ini, tugas utamanya ialah mengelola pendidikan antikorupsi di semua jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga pendidikan tinggi. Selain itu, Ia juga bertanggung jawab melakukan perbaikan pendidikan antikorupsi pada lingkup lembaga pemerintah, masyarakat sipil, partai politik dan sektor swasta, serta mengimplementasikan kampanye antikorupsi di tingkat pusat dan daerah, terutama kepada para pemangku kepentingan dan komunitas yang mewakili kelompok profesional, kaum muda, wanita, dan netizen.

Sebelumnya, pada tahun 2012 hingga 2018 Ia menjabat sebagai Direktur Gratifikasi KPK yang bertanggung jawab dalam penguatan integritas di lingkup pemerintah dan sektor swasta dengan mengembangkan sistem anti-gratifikasi dan anti-suap, sistem pelaporan gratifikasi nasional, melakukan deteksi dan investigasi, dan menerbitkan regulasi terkait gratifikasi. Ia juga pernah menjadi Koordinator spesialis hubungan internasional dan bantuan hukum untuk kasus korupsi antar negara di KPK, Koordinator Proyek Nasional untuk *United Nations Population Fund* (UNFPA) di Jakarta, Peneliti Universitas, Konsultan di Bappenas dan beberapa perusahaan swasta. Ia memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia yang mencakup bidang Pencegahan, Pendidikan dan Penindakan. Sebagai bagian dari KPK sejak 2005, Ia telah menyaksikan berbagai perkembangan dan gejolak yang terjadi di KPK.

Dalam kancah Internasional, Ia aktif dalam berbagai kegiatan antikorupsi, diantaranya menjadi anggota dari *International Association of Anti-Corruption Authorities* (IAACA), Inisiator dan Fasilitator dalam penyusunan *Jakarta Principle of Anti-Corruption Agency,* Tenaga Ahli Indonesia untuk melakukan reviu UNCAC, Inisiator dalam pendirian APEC ECT-NET, Anggota kelompok *Anti-Corruption & Transparency Initiative* (ADB-OECD), Kepala sekretariat panitia *South East Asia Parties Against Corruption* (SEA-PAC), Delegasi Indonesia untuk APEC ACTWG, COSP-UNCAC, Kelompok kerja antisuap OECD, G20 ACTWG, SEAPAC, IAACA, SOMTC, Organisasi multilateral, Perjanjian negosiasi bilateral, dsb.

Dengan berbagai pengalaman tersebut, Ia kerap diundang sebagai pembicara dalam berbagai kegiatan antikorupsi di tingkat internasional dan nasional.

DUNIA DAN COVID-19

worldometer

Last updated: July 06, 2020, 16:25 GMT

Coronavirus Cases:

11,638,961

view by country

Deaths:

538,266

Recovered:

6,584,840

ACTIVE CASES	
4,515,855 Currently Infected Patients	
4,457,165 (99%) In Mild Condition	58,690 (1%) Serious or Critical
Show Graph	

CLOSED CASES	
7,123,106 Cases which had an outcome:	
6,584,840 (92%) Recovered / Discharged	538,266 (8%) Deaths
Show Graph	

#	Country, Other	Total Cases	New Cases	Total Deaths	New Deaths	Total Recovered	Active Cases
1	USA	3,003,464	+20,536	132,678	+109	1,292,077	1,578,709
2	Brazil	1,604,585		64,900		978,615	561,070
3	India	718,872	+21,036	20,171	+471	439,716	258,985
4	Russia	687,862	+6,611	10,296	+135	454,329	223,237
5	Peru	302,718		10,589		193,957	98,172
6	Chile	298,557	+3,025	6,384	+76	264,371	27,802
7	Spain	297,625		28,385		N/A	N/A
8	UK	285,768	+352	44,236	+16	N/A	N/A
9	Mexico	256,848	+4,683	30,639	+273	155,604	70,605
10	Iran	243,051	+2,613	11,731	+160	204,083	27,237
11	Italy	241,819	+208	34,869	+8	192,241	14,709
12	Pakistan	231,818	+3,344	4,762	+50	131,649	95,407
13	Saudi Arabia	213,716	+4,207	1,968	+52	149,634	62,114
14	Turkey	205,758		5,225		180,680	19,853
15	Germany	197,651	+93	9,086		182,200	6,365
16	South Africa	196,750		3,199		93,315	100,236
17	France	166,960		29,893		77,060	60,007
18	Bangladesh	165,618	+3,201	2,096	+44	76,149	87,373
19	Colombia	117,110		4,064		47,881	65,165
20	Canada	105,764	+228	8,687	+3	69,431	27,646
21	Qatar	100,345	+546	133	+5	93,898	6,314
22	China	83,557	+4	4,634		78,518	405
23	Argentina	77,815		1,523	+16	28,531	47,761
24	Egypt	75,253		3,343		20,726	51,184
25	Sweden	71,419		5,420		N/A	N/A
26	Indonesia	64,958	+1,209	3,241	+70	29,919	31,798
27	Belarus	63,804	+250	429	+6	51,120	12,255
28	Iraq	62,275	+1,796	2,567	+94	34,741	24,967

Sumber: https://www.worldometers.info/coronavirus/worldwide-graphs/

63,749
TERKONFIRMASI
+1,607 Kasus

31,473
DALAM PERAWATAN
49.4% dari Terkonfirmasi

29,105
SEMBUH
45.7% dari Terkonfirmasi

3,171
MENINGGAL
5.0% dari Terkonfirmasi

Orang Dalam Pemantauan (ODP)	39,928
Pasien Dalam Pengawasan (PDP)	13,767

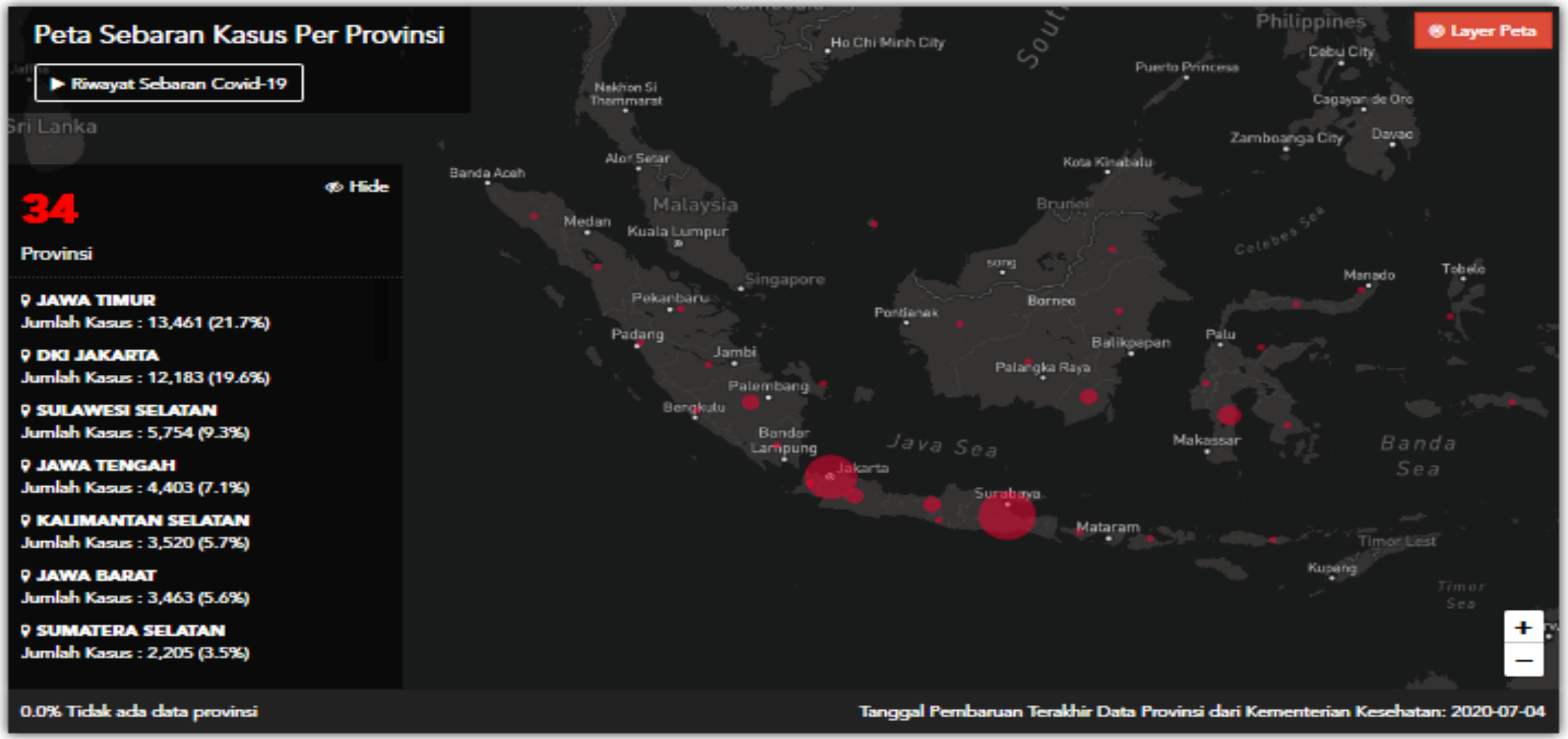

Sumber: https://covid19.go.id/peta-sebaran; Data 6 Juli 2020

Sumber: https://inglebyfarms.com/farms/new-zealand

PSBB DKI JAKARTA

CFD 21 JUNI 2020

Sumber: www.thejakartapost.com

Abai PSBB dan Ramai Pasar di Pekan Terakhir Jelang Lebaran

CNN Indonesia | Senin, 18/05/2020 08:54 WIB

Bagikan :

Sejumlah pasar di Jakarta dan Kota Bogor kembali penuh sesak menjelang lebaran di tengah pelaksanaan PSBB dalam menekan penyebaran virus corona. Ilustrasi. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Besok Lebaran, Warga Padati Pasar Kebayoran Lama saat PSBB

Oke Atmaja | Alfian Winanto

Sabtu, 23 Mei 2020 | 13:37 WIB

Warga berbelanja dengan berkerumun tanpa memperhatikan aturan Physical Distancing, meskipun Jakarta masih dalam masa PSBB

Kondisi Stasiun Manggarai, Jumat (5/6/2020) sore. (Foto: detikcom)

PSBB, Jakarta Macet Mengular

Jumat, 15 Mei 2020 20:15:15

Reporter : Merdeka

PSBB, Jakarta Macet Mengular. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta mencatat ada 1.100 perusahaan atau kantor di Jakarta melanggar aturan PSBB.

HEADLINE MEDIA INDONESIA

07:08 WIB

DIY ALIHKAN DANA PIALA DUNIA U-20 UNTUK COVID-19 • KPK TELUSURI TRAN

METRO TV

BIAYA PENANGANAN COVID-19

untuk menangani kesehatan, perlindungan sosial, dan dukungan UMKM, dunia usaha dan Pemda

(dalam satuan triliun rupiah)

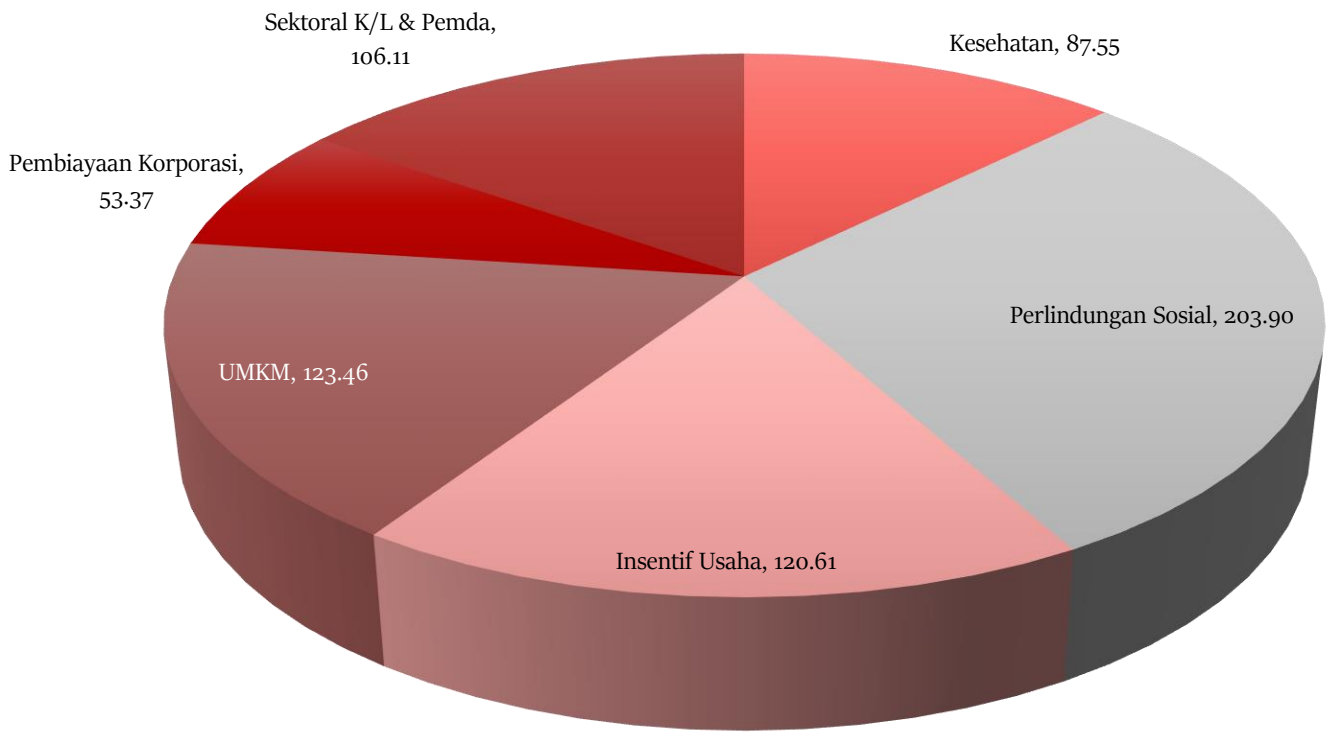

Dengan total biaya penanganan Covid-19 mencapai Rp 695.20 T, KPK harus dilibatkan dalam pencegahan korupsi mulai dari desain regulasi dan formulasi regulasi

Sumber : Kemenkeu, Rapat Koordinasi tanggal 24 Juni 2020, pukul 08.30 WIB

Bentuk-Bentuk Korupsi Implementasi Kebijakan

BANTUAN SOSIAL

- Pemotongan dana bansos
- Penggelembungan jumlah penerima bansos
- Pelaporan fiktif penerima bansos
- Politisasi bansos untuk Pilkada serentak
- Penggelembungan belanja bansos barang
- Under value bansos barang

BELANJA KESEHATAN

Penggelembungan belanja kesehatan

- Belanja fiktif
- Belanja barang bekas namun dianggap baru, oplosan, palsu
- Penggelembungan klaim biaya kesehatan
- Under value belanja barang/jasa
- Suap/gratifikasi

Sumber: ICW

PENGADAAN BARANG/JASA

SE KPK Nomor 8 Tahun 2020 Tanggal 2 April 2020

Tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 Terkait Pencegahan Korupsi

1. PBJ tetap memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Rambu-rambu pencegahan; memberi kepastian bagi pelaksana pengadaan bahwa sepanjang unsur-unsur pidana korupsi tidak terjadi, maka proses PBJ tetap dapat dilaksanakan tanpa keraguan.
3. Dalam situasi bencana, kondisi pasar menjadi tidak normal, sehingga pelaksanaan anggaran dan PBJ mengedepankan harga terbaik/*value for money.*
4. PBJ dalam kondisi darurat cukup menekankan pada prinsip efektif, transparan, dan akuntabel.
5. Mendorong keterlibatan aktif APIP dan BPKP untuk melakukan pengawalan dan pendampingan terkait proses pelaksanaan PBJ dengan berkonsultasi kepada LKPP

UU 31/1999 juncto UU 20/2001

Ada 30 jenis tindak pidana korupsi dan pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kerugian Keuangan Negara
2. Suap
3. Gratifikasi
4. Penggelapan dalam Jabatan
5. Pemerasan
6. Perbuatan Curang
7. Konflik Kepentingan dalam Pengadaan

+ Menghalangi proses hukum

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

YANG TERMASUK PEGAWAI NEGERI

Pasal 1 angka 2 UU No. 20/2001 tentang Perubahan atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)

Kebanyakan orang awam beranggapan bahwa yang dimaksud Pegawai Negeri hanyalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), padahal Undang-Undang mengatur lebih luas bahwa Pegawai Negeri meliputi:

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau yang saat ini disebut Aparatur Sipil Negara (ASN);
2. Pejabat publik (pemangku jabatan/*ambtenaar*) yaitu:
   a. Orang yang memegang jabatan atau profesi yang diangkat oleh instansi umum atau kekuasaan umum atau kekuasaan negara
   b. Orang yang memangku jabatan umum
   c. Orang yang melakukan tugas negara atau sebagian tugas negara
3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
5. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

(Donald R. Cressey, 1950)

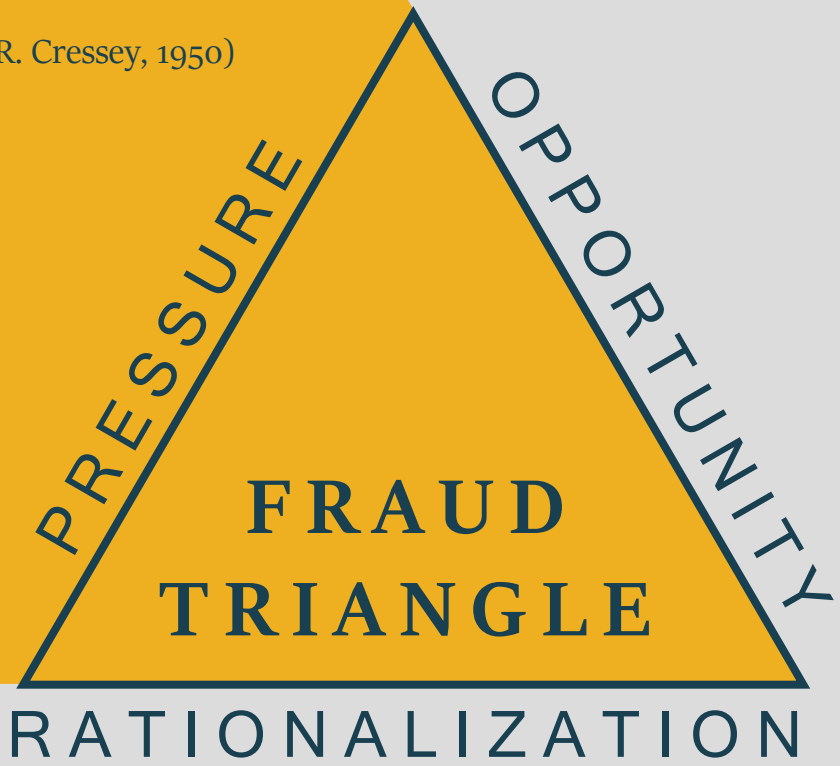

(David T. Wolfe & Dana R. Hermanson, 2004)

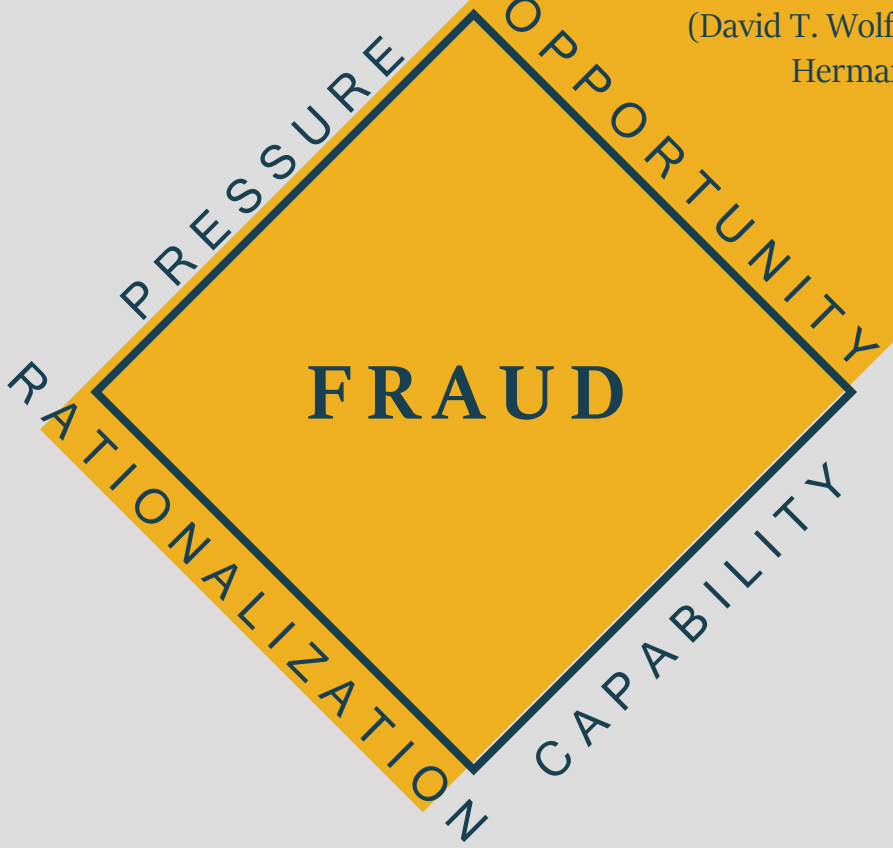

Pressure	Opportunity	Rationalization	Capability
Tekanan dari internal (personal & perusahaan) maupun eksternal	Kesempatan (sistem yang lemah)	Rasionalisasi, pembenaran atas perbuatan yang dilakukan	Kemampuan (jabatan, wewenang, otoritas, kedudukan, pengetahuan atas sistem)

PELAKU TPK YANG DITANGANI KPK

(data per 31 Des 2019)

NO	JABATAN	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	JUMLAH
1	Anggota DPR dan DPRD				2	7	8	27	5	16	8	9	19	23	20	103	10	**257**
2	Kepala Lembaga/Kementerian		1	1		1	1	2		1	4	9	3	2		1	2	**28**
3	Duta Besar				2	1		1										**4**
4	Komisioner		3	2	1	1												**7**
5	Gubernur	1		2	1	1	2	1			2	3	3	1	1	2	1	**21**
6	Walikota/Bupati dan Wakil			3	6	6	5	4	3	3	3	12	4	9	13	30	18	**119**
7	Eselon I, II, III dan IV	2	9	15	10	22	14	12	15	8	6	2	7	10	43	24	26	**225**
8	Hakim							1	2	2	3	2	3	1	3	5		**22**
9	Jaksa					1			2					3	1		3	**10**
10	Polisi									1	1							**2**
11	Pengacara		2					1					2	2		4	1	**12**
12	Swasta	1	4	5	3	12	11	8	10	16	24	16	18	26	28	56	59	**297**
13	Lain-lain		4	1	2	3	4	8	1	2	8	8	3	21	13	31	33	**142**
14	Korporasi														1	4	1	**6**
	JUMLAH	**4**	**23**	**29**	**27**	**55**	**45**	**65**	**38**	**49**	**59**	**61**	**62**	**98**	**123**	**260**	**154**	**1152**

United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) / UU no. 7 Tahun 2006

MERUSAK PROSES DEMOKRASI

MERUNTUHKAN HUKUM

MENURUNKAN KUALITAS HIDUP / PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

MENYEBABKAN KEJAHATAN LAIN BERKEMBANG

PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA

MERUSAK PASAR, HARGA, & PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT

POLITIK CERDAS BERINTEGRITAS

Penindakan → Takut Korupsi

Pencegahan → Tidak Bisa Korupsi

Pendidikan & Peran serta Masyarakat → Tidak ingin korupsi

Kelengkapan dan kecukupan hukum

Komitmen Politik dan Pimpinan

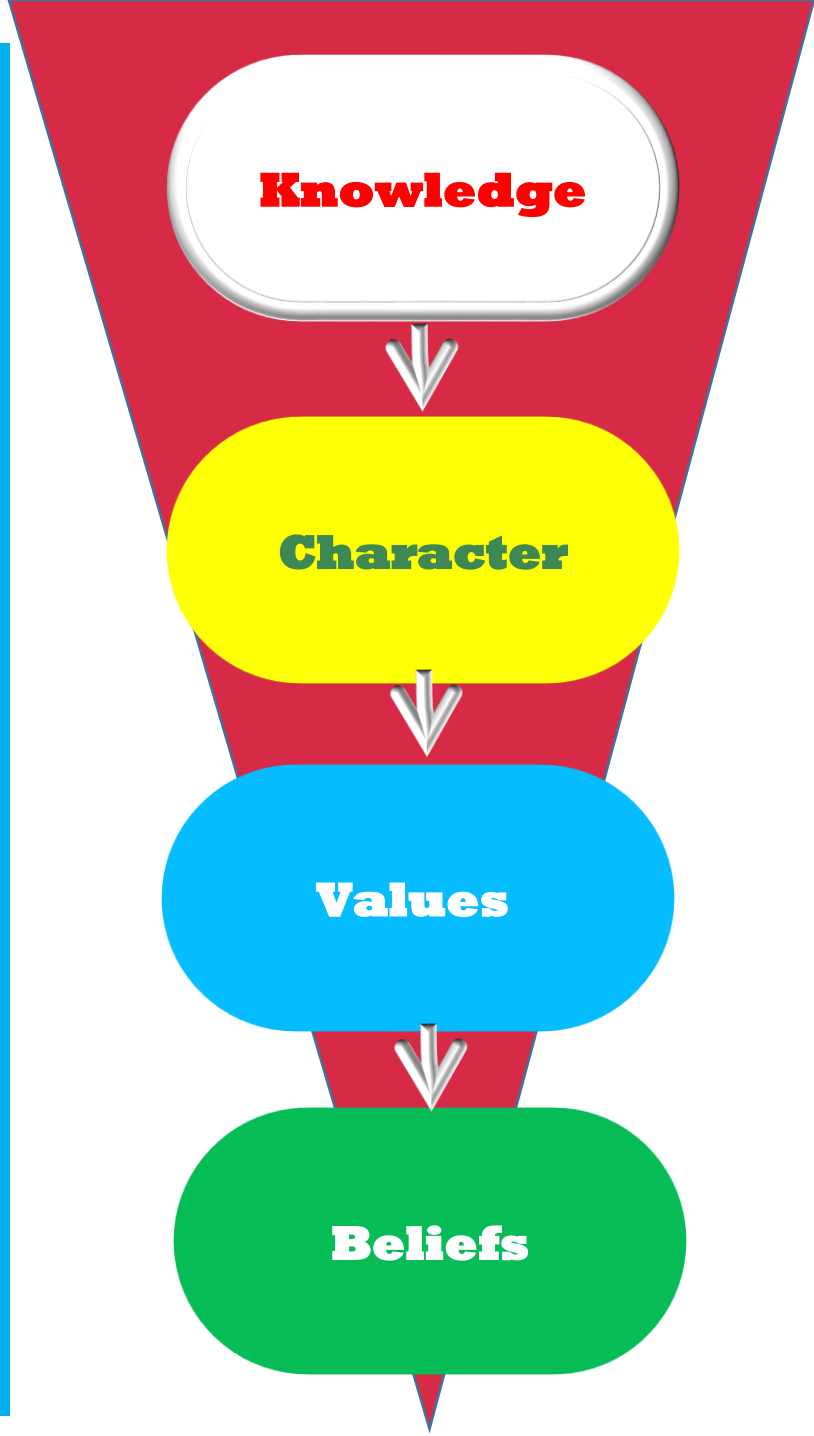

SISTEM
(ORGANISASI)

V.S

INTEGRITAS
(INDIVIDU)

Indeks Persepsi Korupsi

Mengukur persepsi korupsi secara global di sektor publik yang dilakukan oleh pejabat negara dan politisi

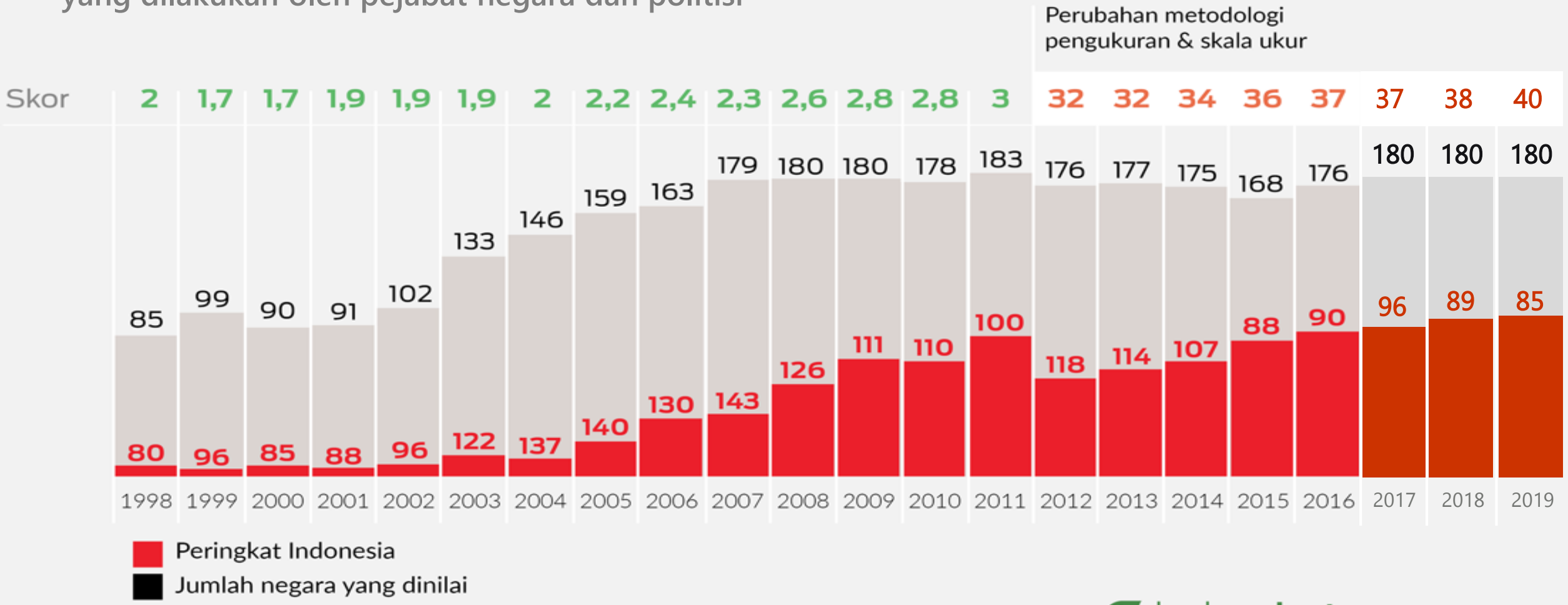

Sumber: Transparansi Internasional

lokadata
Oleh Beritagar.id

- Sumber: Transparency Interational

ASEAN CPI 2019

Rank	CPI 2019	Country	CPI 2018
4	85	Singapore	85
35	60	Brunei Darussalam	63
51	53	Malaysia	47
85	40	Indonesia	38
93	38	Timor Leste	35
96	37	Vietnam	33
101	36	Thailand	36
113	34	Philippines	36
130	29	Laos	29
130	29	Myanmar	29
162	20	Cambodia	20

Sumber: TI Indonesia, Peluncuran CPI 2019, 23 Januari 2020

Kondisi CPI KPK pada tahun 2019 adalah sebesar 40 yang mengalami kenaikan 2 poin jika dibandingkan tahun 2018.

CPI SCORE

40

Economist Intelligence Unit/EIU (Country Risk Rating):

- Akuntabilitas dana publik
- Penyalahgunaan dana publik
- Pendanaan khusus yang tdk akuntabel
- Rekrutmen PNS
- Independensi Badan Audit
- Independensi Peradilan
- Kebiasaan suap u/ kontrak

37

Bertlesmann Transformation Index:

- Efektivitas pemidanaan tipikor pada pejabat publik
- Kesuksesan mengontrol korupsi dan efektivitas penegakan integritas

37

IMD world Competitiveness:

- **Eksistensi Suap dan Korupsi**

48

International Country Risk Guide:

- Suap terkait ijin ekspor-impor, kontrol perdagangan, penghitungan pajak, perlindungan polisi, pinjaman
- Potensi atau korupsi aktual dalam bentuk kroni, nepotisme, pendanaan rahasia, kedekatan politik dan bisnis

59

World Justice Project:

- Mengukur ketaatan satu negara dalam penegakan hukum *(rule of law)*
- Mengukur penyalahgunaan kewenangan publik pada: Eksekutf, Yudisial, Polisi/Militer dan Legislatif

21

Global Insight (Country Risk Rating):

- Korupsi, dampaknya terhadap operasional bisnis (analisis penyebab politis & ekonomi)
- Assessmen pengalaman pebisnis dalam proses perjinan dan regulasi pendukung

47

World Economic Forum – Executive Opinion Survey:

- Seberapa lazim perusahaan tidak mendokumentasikan suap terkait Impor-Ekspor, fasilitas publik, pembayaran pajak tahunan, *kickback* kontrak, memenangkan putusan pengadilan
- Seberapa lazim dana publik dialihkan

46

Varities Democracy Project (baru masuk di 2017)

- Mengukur 7 prinsip demokrasi suatu negara : electoral, liberal, participatory, deliberative, egalitarian, majoritarian and consensual

28

PERC:

- Persepsi korupsi sektor publik :
  a. Pimpinan politik nasional dan lokal
  b. PNS Pusat dan Daerah
- Persepsi Korupsi pada instansi tertentu: (Kepolisian, pengadilan, BC, Pajak, Perijinan, Pengawasan,

36

CPI INDONESIA 2019

Sumber: TI Indonesia, Peluncuran CPI 2019, 23 Januari 2020

DPR dan Parpol tidak dipercaya Publik

(survei ahli LIPI 2018).

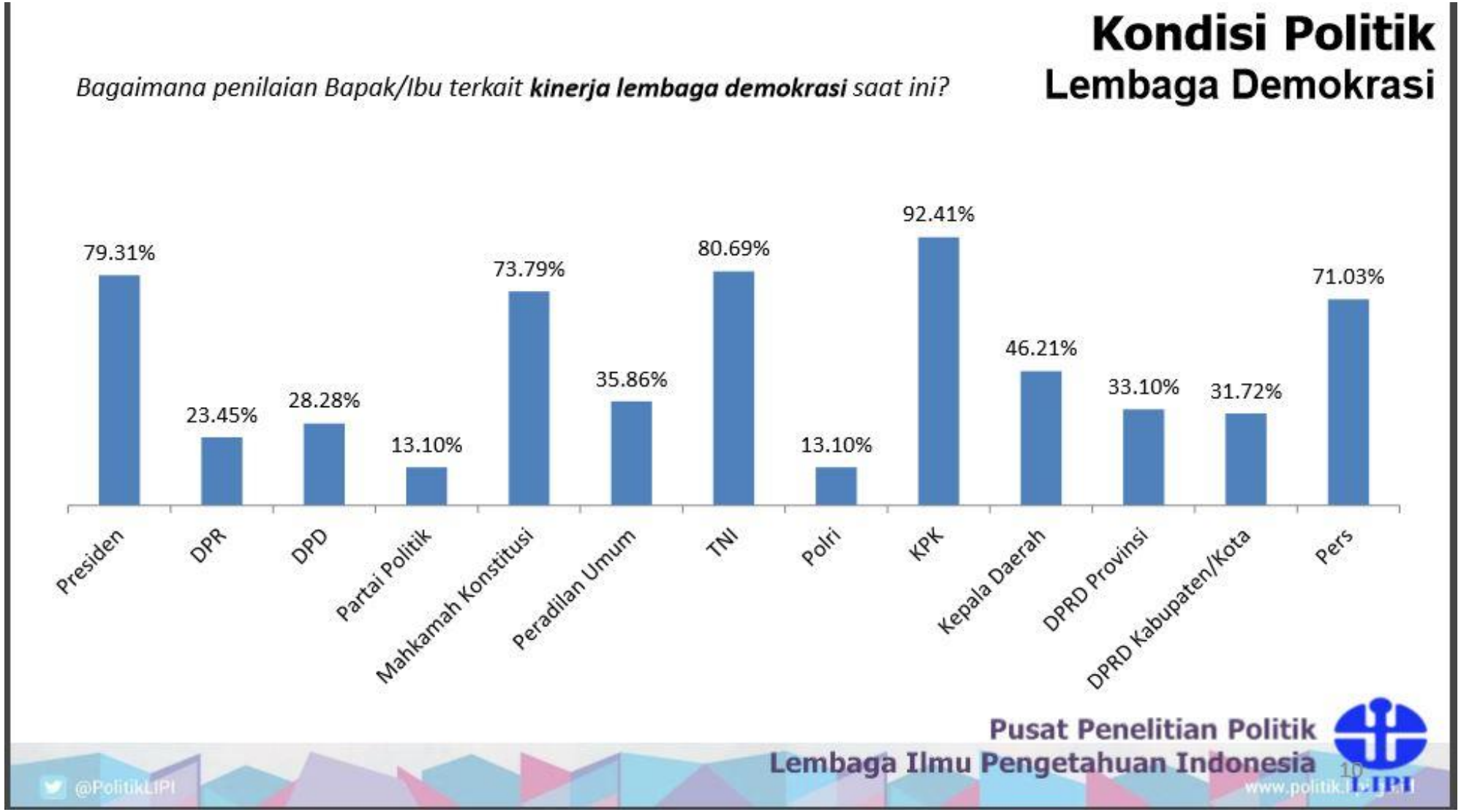

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

...uk gerang rumah dari truk yang terguling di Jalan Raya Bypass Km 51, Desa Kenanten, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, kemarin.

...n Berdalih Investasi

Terobsesi Angka 757

"SEMOGA tahun depan kita dipromosikan naik ke Liga 2 Indonesia. Tetap semangat! #NB757 #757-KepriJayaFC." Begitu kira-kira penutup arahan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun kepada para calon pemain 757 Kepri Jaya FC awal bulan lalu. Melalui staf pribadi, Nurdin mem-posting kalimat dan foto-foto suasana latihan sepak bola di akun Instagram nurdin757.

▸ Baca Terobsesi... Hal 15

...EDRIK TARIGAN/ JAWA POS

Politik Koruptif Adalah Ekses Demokrasi

Oleh **GIRI SUPRAPDIONO**

Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) KPK

REALITAS demokratisasi meningkat pesat di Indonesia sejak era reformasi. Namun, di sisi lain, korupsi menjadi begitu marak. Penyalahgunaan kekuasaan dan keuangan negara tumbuh kembang bermutasi dalam bentuk yang semakin kompleks.

▸ Baca Politik... Hal 15

...Putuskan Ba...

Dwi Irianto
...lias Mu...

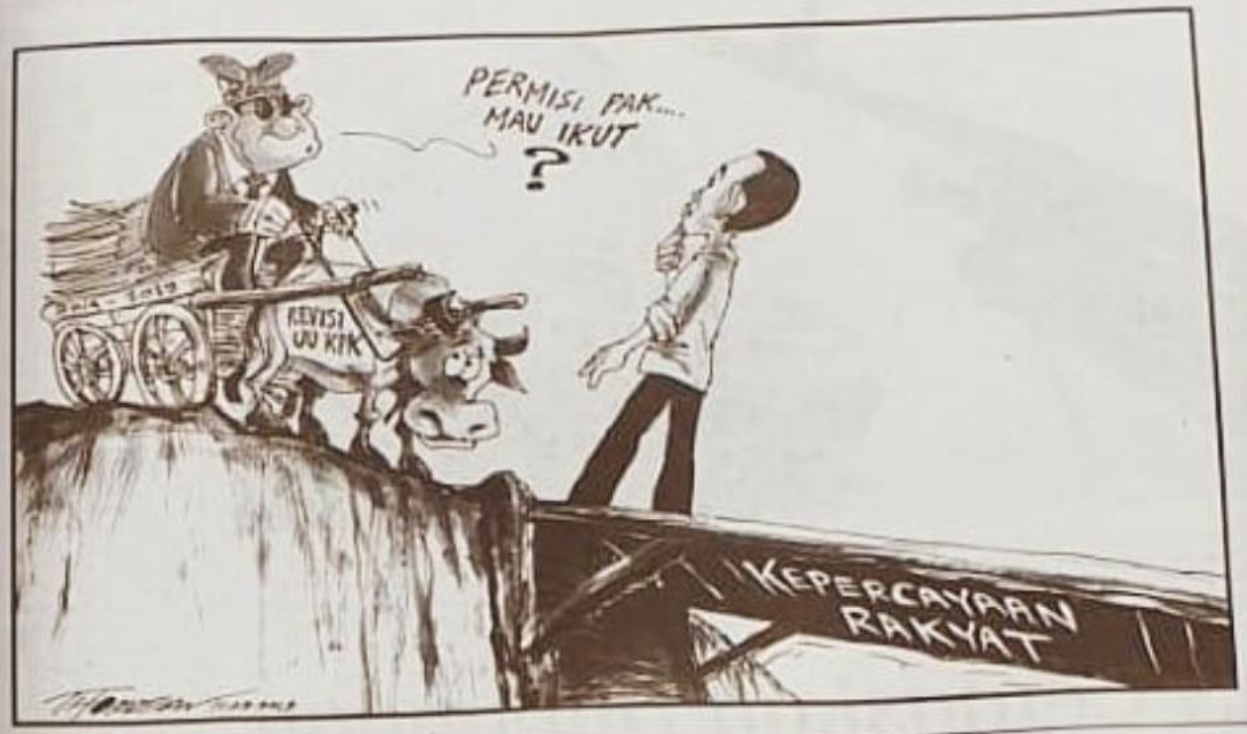

Politik Pemberantasan KPK

Giri Suprapdiono

Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi

"...Apa yang ada lahan (tempat tanaman) ini ...ikes itu tidak mubah? Apakah tidak kau ...lat politikus yang berpak pada kepentingan ...pada rakyat."

Soekarno, 1964

Beberapa minggu ini Kita disuguhi berita kontroversial terkait calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan penolakan terhadap

...saan. Penyelidik dan penyidik yang disuntik KPK saat ini dengan sendirinya akan dihapus dan dianggap telah sah.

Padahal, saat ini aparatur sedang melakukan kegiatan penyelidikan untuk menemukan alat bukti dari perkara yang sedang berjalan. Sebagai konsekuensinya, kasus-kasus yang sedang ditangani penyidik independen KPK akan berhenti. Upaya KPK selama hampir dua dekade membangun SDM dan melakukan penguatan kelembagaan di kedepatian penindakan yang profesional dan berintegritas sirnalah akan kandas.

Selama ini proses penyidikan dan ...

dapat. Ada lembaga lain yang memiliki kewenangan penyadapan, seperti Polri, Kejaksaan, BIN, BNPT, dan BNN.

Keempat, KPK diperbolehkan menghentikan kasus yang sedang ditangani-nya atau SP3. KPK meninggalkan status kasus ke penyidikan melalui proses yang sangat hati-hati karena tak adanya penghentian penyidikan dan penuntutan. Melalui ketentuan ini akan menyerahkan status KPK dalam penanganan kasus. Penghentian penyidikan dan penuntutan yang belum selesai dalam satu tahun akan rawan dan berpotensi diintervensi. Terlebih pada kasus yang besar dan ...

...daya yang memadai, kecukupan bukan, independensi, dan banyak hal penting lainnya.

Pertemuan ini didasarkan atas fakta bahwa pejuang antikorupsi di belahan dunia mana pun mengalami perlawanan yang luar biasa dari para koruptor dan kadang oleh negaranya dalam bentuk state capture corruption, korupsi yang dilakukan dalam suatu negara. Prinsip ini pun sudah disepakati dan diadopsi International Association of Anticorruption Authorities (IAACA) dan resolusi PBB dalam beberapa pertemuan negara pihak UNCAC (Konvensi Antikorupsi PBB). Prinsip ini sejalan dengan Pasal 6 ...

Pola pemberantasan korupsi yang paling efektif adalah kombinasi dari legislatif anti-korupsi yang komprehensif yang dilaksanakan secara imparsial oleh lembaga independen anti-korupsi.

Penyebab utama perilaku korup adalah remunerasi yang rendah, adanya kesempatan, dan lemahnya tingkat deteksi dan sanksi.

Strategi anti korupsi yang efektif harus mengurangi peluang korupsi, meningkatkan risiko deteksi dan hukuman, dan meningkatkan gaji hanya ketika negara yang bersangkutan mampu melakukannya.

Enam pelajaran dapat dipetik dari pengalaman lima negara Asia dalam melakukan reformasi anti-korupsi.(Singapura - Hong Kong - Filipina - Mongolia - India)

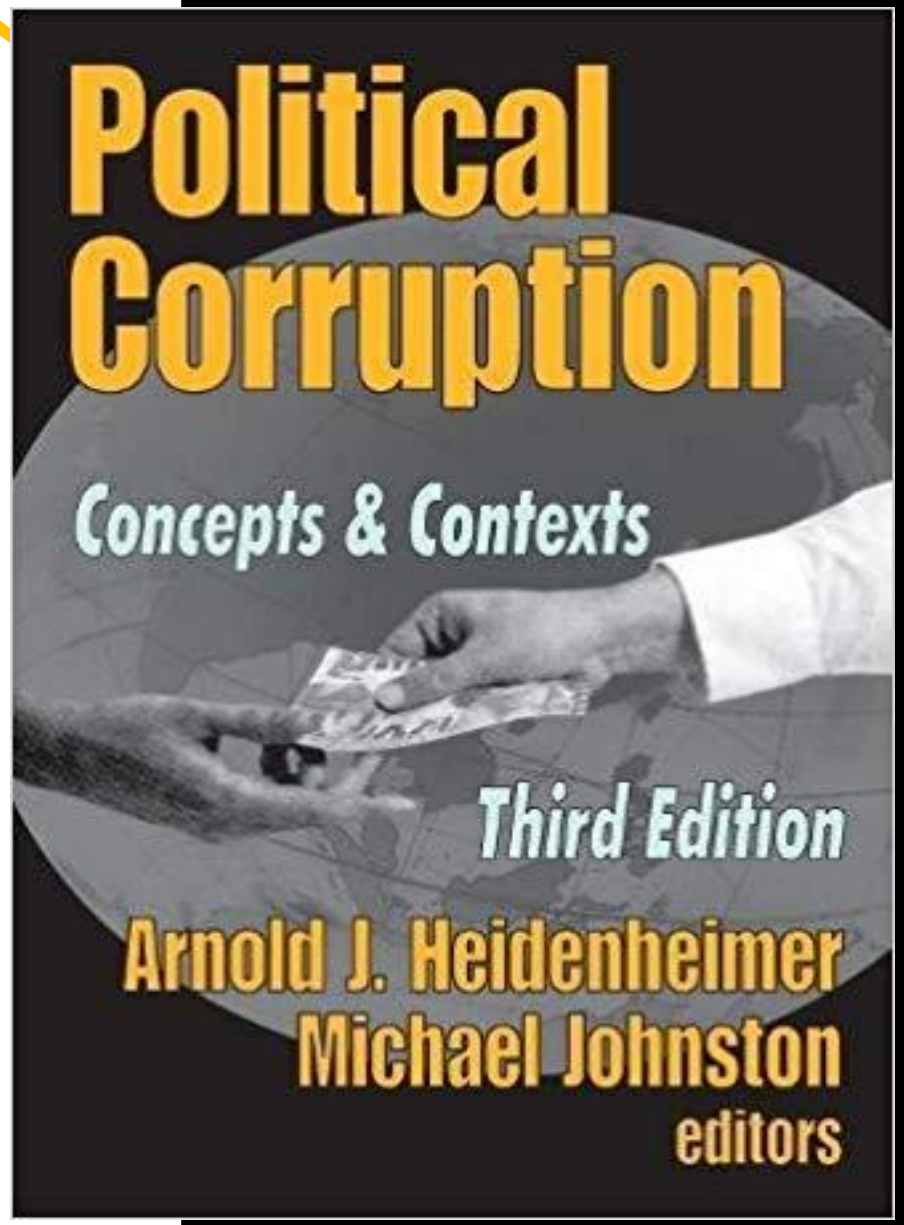

Political Corruption Book, Part VIII Chapter 28
Responses to corruption in Asian Societies
*by **John S.T. Quah***

6 +

LESSONS LEARNT

Enam pelajaran yang dipetik untuk melakukan reformasi anti-korupsi dari pengalaman lima negara Asia*:

1. Komitmen Para Pempimpin Politik
2. Strategi yang Komprehensif
3. Lembaga Anti-Korupsi harus Anti-Korupsi
4. Lembaga Anti-Korupsi harus bebas dari kontrol Penegak hukum lain (kepolisian, kejaksaan, dll)
5. Mengurangi Peluang Korupsi di Instansi yang rawan korupsi
6. Menaikkan Remunerasi (jika negara mampu)

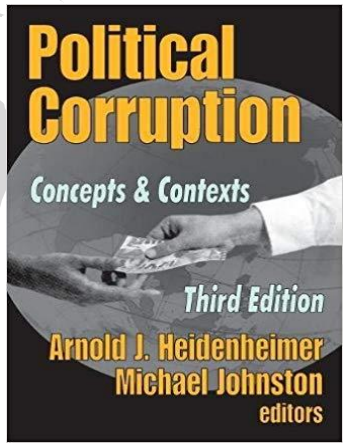

- Korupsi dirumuskan dalam 30 jenis tipikor, dikelompokkan menjadi tujuh jenis besar.

Jenis Tipikor (UU No.31/1999 jo.UU No.20

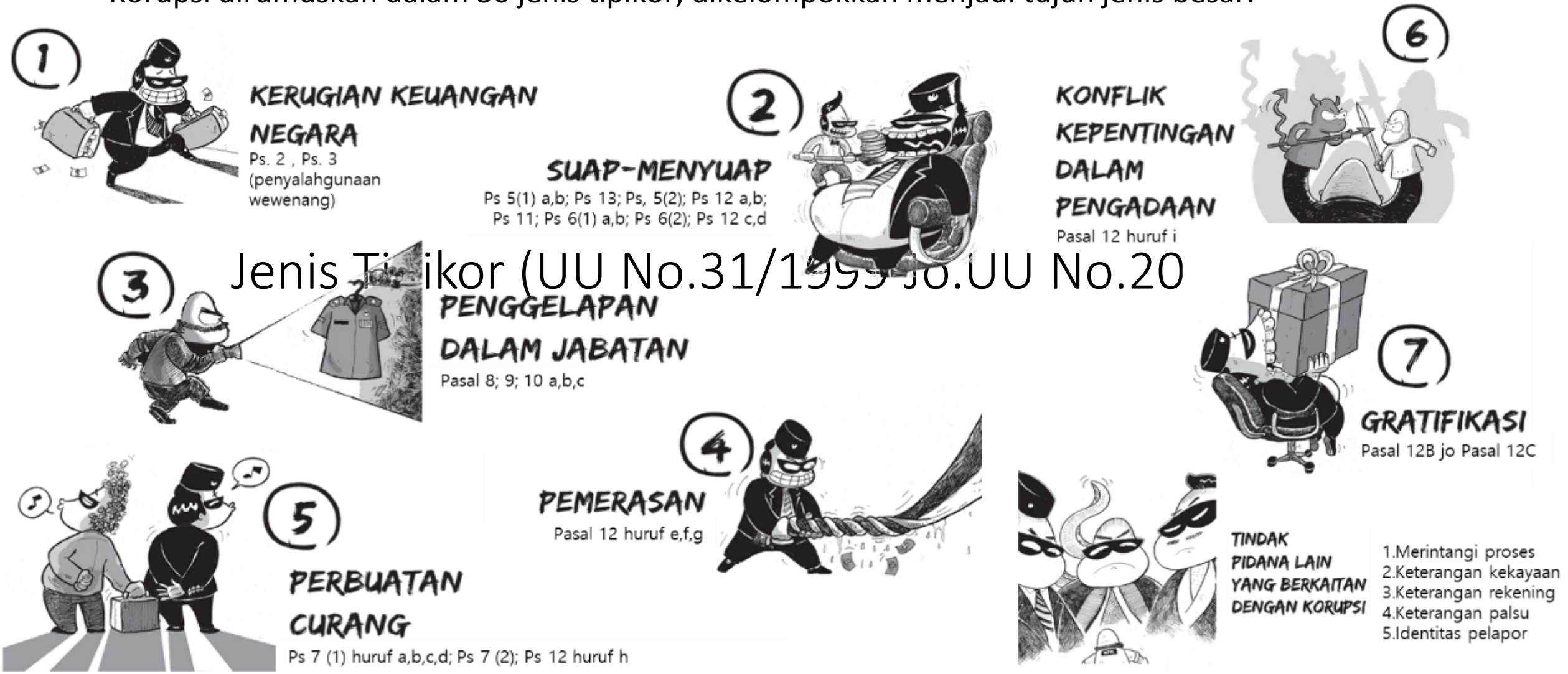

- Berdasarkan Jenis Profesi/Jabatan Tahun 2004 – Mei 2020

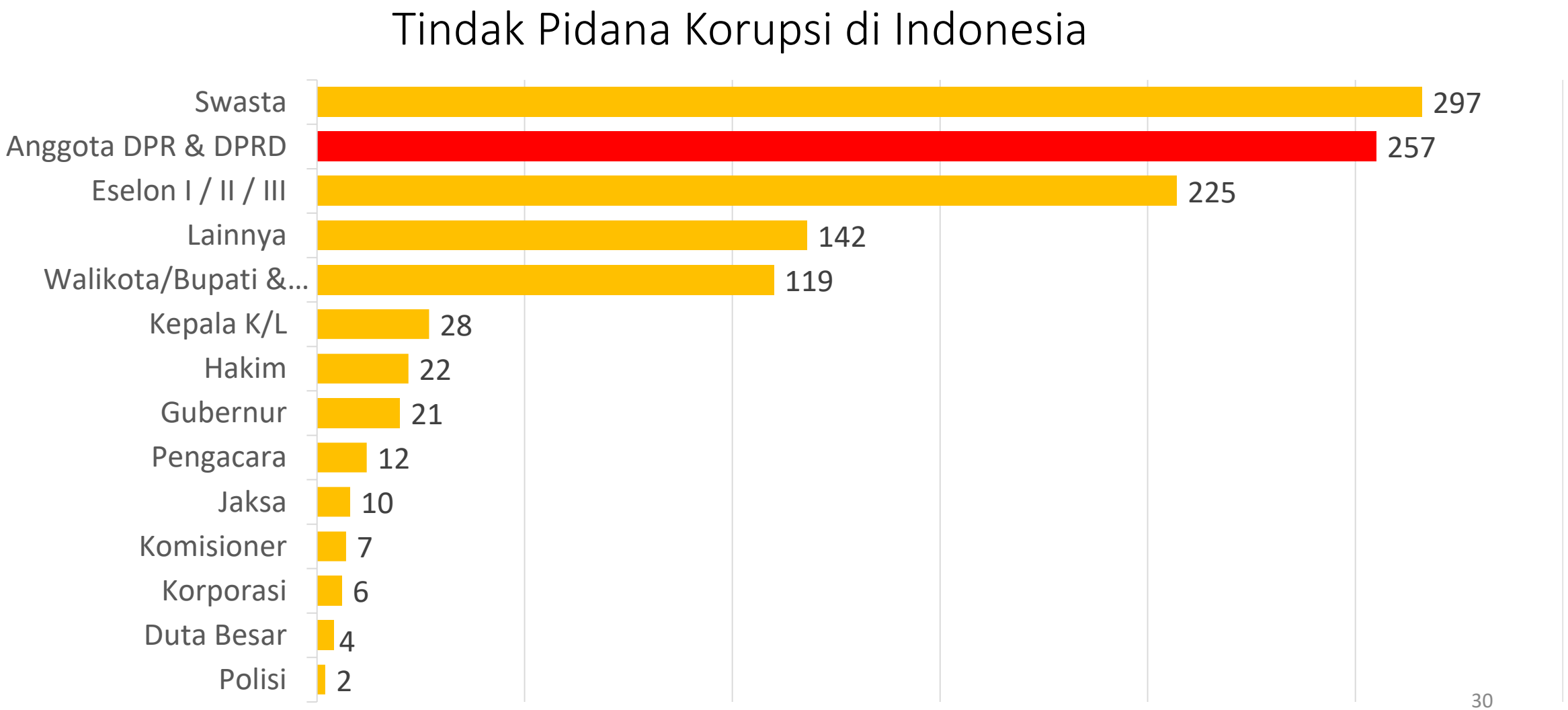

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

- Berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2014 – Mei 2020

PERKARA	JUMLAH
Pengadaan Barang/Jasa	206
Perijinan	23
Penyuapan	683
Pungutan	26
Penyalahgunaan Anggaran	48
TPPU	36
Merintangi Proses KPK	10
Jumlah Total	1032

25 dari 34 PROVINSI Terjadi Kasus KORUPSI 2004 - 2019

yang ditangani KPK

Sumber: Data Penindakan KPK, Des 2019

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi
BERANI JUJUR HEBAT!

- MALUKU 6 KASUS
- NTB 12 KASUS
- NTT 5 KASUS
- PAPUA 22 KASUS
- KALTIM 22 KASUS
- SULUT 10 KASUS
- SULSEL 5 KASUS
- SULTENG 5 KASUS
- SULTRA 8 KASUS
- DKI Jakarta 61 KASUS
- BANTEN 24 KASUS
- JABAR 101 KASUS
- JATENG 49 KASUS
- JATIM 85 KASUS
- BALI 5 KASUS
- KALSEL 10 KASUS
- KALTENG 5 KASUS
- NAD 14 KASUS
- SUMUT 64 KASUS
- SUMSEL 22 KASUS
- SUMBAR 3 KASUS
- JAMBI 12 KASUS
- RIAU & KEP 51 KASUS
- BENGKULU 22 KASUS
- LAMPUNG 30 KASUS

TITIK KRUSIAL PENGANGGARAN PADA PILKADA

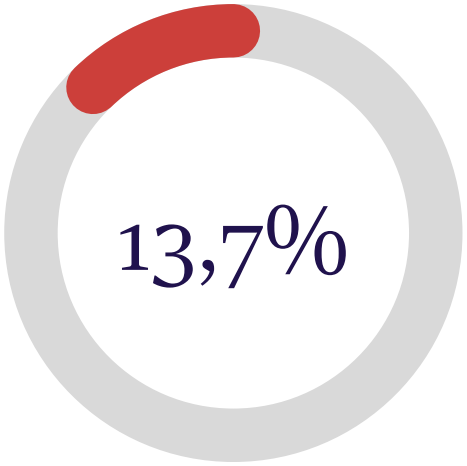

Dari 270 daerah yang menyelenggarakan Pilkada, 37 daerah di antaranya (13,7%) menganggarkan Jaring Pengaman Sosial diatas 40% dari total anggaran Covid-19.

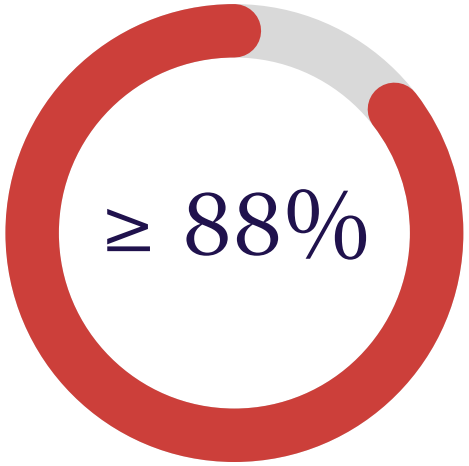

Pada daerah pilkada yang memiliki potensi petahana maju kembali, *range* anggaran JPS adalah 32% hingga 88%.

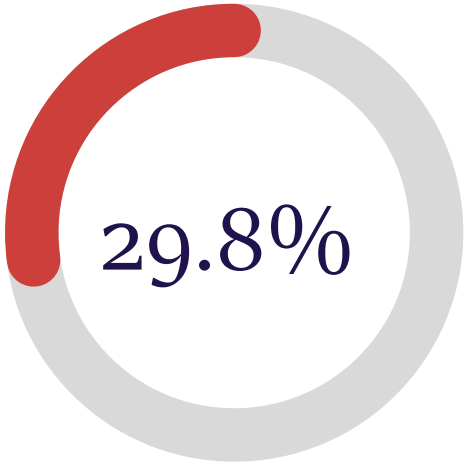

Dari 100% total dana desa, berpotensi dialokasikan sejumlah 29,8%nya (21.22T) untuk BLT

JAGA BANSOS

Platform pencegahan korupsi untuk menyampaikan laporan dugaan penyimpangan / penyelewengan BANSOS yang dapat digunakan di mana saja, kapan saja dan oleh siapa saja

669
KELUHAN BANSOS

200
PEMDA MENERIMA KELUHAN

TOP 3 KELUHAN KE PROVINSI

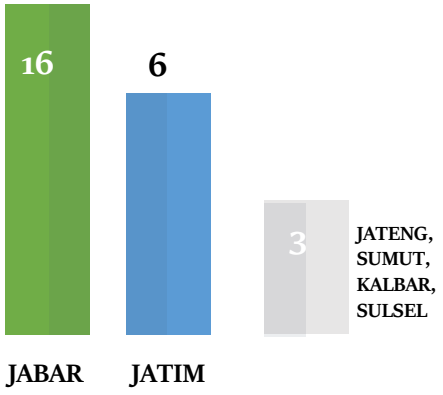

TOP 3 KELUHAN KE KAB/KOTA

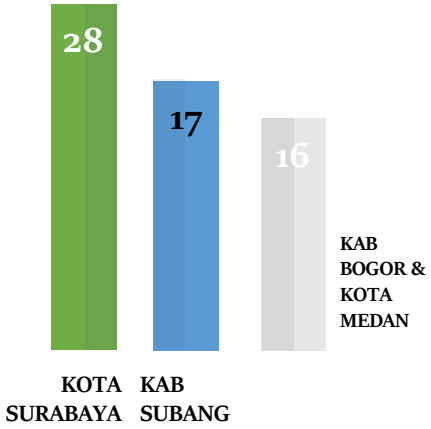

261
LAPORAN DITERUSKAN

41
DITINDAKLANJUTI

76
SELESAI

Data per 25 Juni 2020

GET IT ON Google Play | Download on the App Store | https://jaga.id

PENCEGAHAN SEKTOR POLITIK 2020

ISU MENDASAR POLITIK

01

BIAYA POLITIK MAHAL

02

BANTUAN NEGARA SANGAT RENDAH

03

PENGHARGAAN & APRESIASI RENDAH

Tantangan Pemilu di Indonesia

Politik Transaksional

- Jual beli tiket/kursi pencalonan *(candidacy buying)*
- Jual beli suara pemilih (*vote buying*)
- Menyuap penyelenggara/hakim pemilihan
- Uang semakin dominan, politik dibuat sangat mahal.

Kampanye

Ditempatkan sebagai aktivitas populis artifisial, simbolik menunjukkan kehadiran fisik parpol atau calon, tapi belum sebagai bagian dari aktivitas pendidikan politik.

Kabar Hoax

Penyebaran kabar bohong (*hoax*), berita bohong (*fake news*), ujaran kebencian (mengajak melakukan kekerasan, sentimen SARA, dan penghilangan hak pilih).

Post Truth Era

"Where facts matter less than emotions in influencing decision or policy."

Ketika fakta tidak lebih penting daripada emosi yang mempengaruhi pembuatan keputusan atau kebijakan.

Integritas dan Tata Kelola

penyelenggaraan pemilu.

Mentalitas siap menang tidak siap kalah.

PILKADA BERINTEGRITAS

PESERTA → Kandidat, Parpol

PENYELENGGARA → KPU, BAWASLU, DKPP

PEMILIH → MASYARAKAT

Tugas Lid, Dik, Tut (Pasal 11) UU 30 / 2002 tentang KPK

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:

1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
2. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau;
3. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dari segi penindakan kasus money politik apabila ada unsur korupsinya maka yang bisa ditangani KPK adalah Penyelenggara Pemilu karena termasuk penyelenggara negara, dan untuk Kandidat dari Parpol (yang bukan PN) serta Masyarakat yang melakukan money politik merupakan wewenang Bawaslu dan Apgakum (Kepolisian dan Kejaksaan).

TARGET SASARAN

Penyelenggara (Regulator dan Pengawas)

Memastikan sosialisasi dan edukasi masyarakat terkait pemilu berintegritas serta memastikan pemilu dilaksanakan dan diawasi dengan netral dan sesuai koridor aturan yang berlaku.

Peserta

Peserta pemilu (Caleg, Capres Cawapres) perlu diedukasi untuk berkomitmen melaksanakan dan mengawal pelaksanaan pemilu dengan berintegritas

Pemilih

Masyarakat perlu diedukasi mengenai penggunaan hak pilih dengan berintegritas serta tips-tips memilih calon pemimpin yang berintegritas

PILIH YANG JUJUR

POLITIK CERDAS BERINTEGRITAS

PENYEBAB MONEY POLITIK

Tingginya Biaya Politik

1. Penyebab : Sistem Pilkada membutuhkan biaya politik yang mahal, tuntutan parpol, parpol pendukung bekerja tidak maksimal, biaya saksi.
2. Implikasi : muncul Janji Politik dengan mitra potensial

Politik Uang

Tingginya biaya kampanye secara riil, sehingga politik balas jasa atas sumbangan kampanye saat pilkada.

PILIH YANG JUJUR.

POLITIK CERDAS BERINTEGRITAS

UNDANG- UNDANG YANG MENGATUR TENTANG MONEY POLITIK

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU

Pasal 228

1. Partai politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden;

2. Dalam hal Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Partai Politik yang bersangkutan dilarang dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya;

3. Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

4. Setiap orang atau lembaga dilarang memberikan imbalan kepada Partai Politik dalam bentuk apa pun dalam proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PILKADA

diatur bahwa baik pemberi maupun penerima 'uang politik' sama-sama bisa kena jerat pidana berupa hukuman penjara:

1. Pada Pasal 187A ayat (1), Undang-Undang tentang Pilkada diatur, setiap orang yang sengaja memberi uang atau materi sebagai imbalan untuk memengaruhi pemilih maka orang tersebut dipidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan, plus denda paling sedikit Rp 200 juta hingga maksimal Rp 1 miliar.

1. Pada Pasal 187A ayat (2), diatur ketentuan pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PILIH YANG JUJUR

POLITIK CERDAS BERINTEGRITAS

PILIH YANG
JUJUR.

Sistem Integritas Partai Politik (SIPP)

- **Pengukuran indikator sistem integritas partai politik dilakukan berdasarkan 5 komponen internal yang terdiri atas 19 variabel.**

Sistem Integ

DISEMINASI SIPP

- Kepada anggota DPRD beserta komisioner KPU & Bawaslu di **58 Kabupaten dan Kota**
- Kelas Politik Cerdas Berintegritas di Provinsi DKI Jakarta (4 angkatan) dan Sumatera Utara (2 angkatan)
- Sosialisasi antikorupsi dan integritas atas undangan Partai Politik

PEMILU 2019 BERINTEGRITAS

Bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu melaksanakan kegiatan:

- Talkshow Pemilu Berintegritas “Pilih yang Jujur”
- Pemilu Run

Dukungan KPK

2012
Kajian Sistem & Partai Politik

2013
Kajian Sistem Parlemen

2014
- Program Pemilu Berintegritas
- Buku Putih KPK u/ Presiden & DPR

2015
Program Pilkada Berintegritas

2016
- Kajian Sistem Integritas Parpol (Pendanaan, Kode Etik, Rekrutmen & Kaderisasi)
- Program Politik Cerdas Berintegritas

2017
- Dukungan Implementasi Sistem Integritas Parpol (Kertas Posisi & *Tools of Assesment*)
- Program Politik Cerdas Berintegritas

2018
- Kajian Pembenahan Sistem Pilkada
- Kajian RUU Parpol
- Kajian SIPP (Pendanaan, Kode etik, Rekrutmen, Kaderisasi & Demokrasi Internal)
- Kelas PCB Politisi

2019
- Kajian Pendanaan Parpol
- Kajian RUU Parpol
- Kajian Pembenahan Sistem Pilkada
- Kelas PCB Politisi

TELADAN PEMIMPIN BERINTEGRITAS

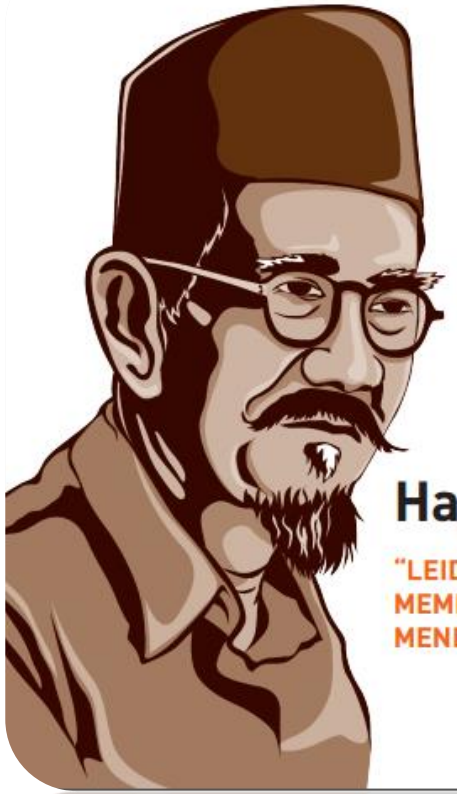

Haji Agus Salim

"LEIDEN IS LIJDEN, MEMIMPIN ADALAH MENDERITA"

Baharuddin Lopa

MENAKAR DENGAN PIKIR DAN HATI, MENOLAK APA PUN YANG TAK MASUK DALAM TAKARANNYA.

Sri Sultan Hamengku Buwono IX

SETIAP ORANG, SIAPA PUN DAN APA PUN JABATANNYA, HARUS TAAT KEPADA HUKUM.

Sumber: Buku Orange Juice, KPK

TELADAN PEMIMPIN BERINTEGRITAS

Hoegeng Iman Santoso

PANTANG TERIMA PEMBERIAN KARENA JABATAN.

Ki Hadjar Dewantara

LEBIH BAIK TAK PUNYA APA-APA TAPI SENANG HATI DARIPADA BERGELIMANG HARTA NAMUN TAK BAHAGIA.

Mohammad Hatta

SETIAP PERBUATAN ADALAH DEMI NEGARA YANG DICINTAI, JANGANLAH BERKHIANAT.

Sumber: Buku Orange Juice, KPK

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

Kontak Layanan Pengaduan Masyarakat

- KPK menyediakan berbagai saluran dalam menampung pengaduan tindak pidana korupsi

http://kws.kpk.go.id
KPK Whistle-blower's System

198

(021) 5289 2454

0855 8 575 575
0811 959 575

pengaduan@kpk.go.id

Yang perlu diperhatikan:
- Persyaratan pelaporan
- Kelengkapan pelaporan
- Bukti permulaan pendukung pelaporan
- Perlindungan bagi pelapor

TERIMA KASIH.

ANTI VIRUS - korupsi -

informasi@kpk.go.id